

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan *Universal Health Coverage* (UHC). Pemerintah menargetkan Negara Indonesia akan mencapai UHC atau cakupan kesehatan menyeluruh bagi seluruh penduduk Indonesia pada 1 Januari 2019 yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Jaminan Kesehatan masyarakat melalui JKN yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan setiap orang. (Yuli Puspitasari, 2017).

Pada tahun 2004, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU 40/2004 ini mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 juga menetapkan, Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasinya dimulai 1 Januari 2014 (Buku Pegangan Sosialisasi JKN).

Berdasarkan Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2011, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (RUU, 2011).

Kepesertaan pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Jaminan Kesehatan

adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. (Kemenkeu, 2018).

Karakteristik merupakan ciri-ciri individu yang terdiri dari demografi seperti jenis kelamin, umur serta status sosial seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, ras, status ekonomi, dan sebagainya (Prawisudawati, 2014). Aspek kepesertaan juga merupakan indikator keberhasilan penyelenggaraan program JKN. Menurut Badan Pusat Statistik, cakupan kepesertaan JKN di wilayah Provinsi Jawa Timur sebesar 77,61%. Sedangkan di Sidoarjo jumlah kepesertaan JKN sebesar 99,8%.

Menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (2022), penduduk Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon sebesar 3.429 orang. Adapun jumlah peserta JKN yang terdaftar sebagai peserta aktif PBI 66,8 %, peserta PPU sebesar 10,9%, peserta PBPU sebesar 2,24%, peserta BP 0,17% . Berdasarkan data tersebut terdapat jumlah peserta JKN yang non-aktif pada peserta PBI sebesar 9,47 %, peserta PPU sebesar 2,04%, peserta PBPU sebesar 2,09%, dan peserta BP sebesar 0,17%. Selain itu, peserta yang belum terdaftar sebagai peserta JKN sebesar 4,22%.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Munawir Rizal Niha (2018) tentang Hubungan Karakteristik Individu dan Pengetahuan Tentang JKN-KIS di Kecamatan Singkil Kota Manado menunjukkan hasil adanya pengaruh antara tingkat pekerjaan dengan pemanfaatan JKN oleh masyarakat yang telah menjadi peserta JKN, yang dimana status pekerjaan merupakan salah satu faktor predisposisi yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam pemilihan pelayanan kesehatan, yang dalam hal ini adalah pelayanan kesehatan yang didapatkan pada program JKN. Selain itu bahwa pengetahuan dan pendidikan masyarakat tergolong tinggi dan berperan sebagai faktor pendukung

dan mempengaruhi status kepesertaan JKN (Munawir Rizal Niha, 2018)

Berdasarkan studi pendahuluan ditemukan fakta sebanyak 48,3% peserta PBPU yang terdaftar sebagai peserta JKN memiliki status kepesertaannya adalah non-aktif. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian terkait Faktor Predisposisi Dan Pendorong Pada Peserta PBPU Non-Aktif Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Desa Kedungpandan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan pada penelitian ini adalah :

Bagaimana Faktor Predisposisi Dan Pendorong Pada Peserta PBPU Non-Aktif Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Desa Kedungpandan Jabon Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan

1. Tujuan Umum

Mengetahui Faktor Predisposisi Dan Pendorong Pada Peserta PBPU Non-Aktif Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Desa Kedungpandan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui tingkat pendidikan pada peserta PBPU Non-aktif di Desa Kedungpandan Jabon Kabupaten Sidoarjo.
- b. Mengetahui tingkat pengetahuan pada peserta PBPU Non-aktif di Desa Kedungpandan Jabon Kabupaten Sidoarjo.
- c. Mengetahui tingkat pekerjaan pada peserta PBPU Non-aktif di Desa Kedungpandan Jabon Kabupaten Sidoarjo.
- d. Mengetahui tingkat pendapatan pada peserta PBPU Non-aktif di Desa Kedungpandan Jabon Kabupaten Sidoarjo.
- e. Mengetahui tingkat motivasi pada peserta PBPU Non-Aktif di Desa Kedungpandan Kabupaten Sidoarjo.

- f. Mengetahui tingkat persepsi pada peserta PBPU Non-Aktif di Desa Kedungpandan Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi tambahan dalam memperkuat hasil-hasil studi yang berkaitan dengan faktor predisposisi dan pendorong pada peserta PBPU non-aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penulis dapat mempraktikkan teori yang didapat secara langsung di lapangan dan melihat secara langsung kejadian yang terjadi di lapangan.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat terhadap faktor predisposisi dan pendorong peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

